

ISSN 2407-6244

**JURNAL**



**MSDM**

**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

Vol. 3, No. 2/Desember 2016

**Elvira Mulya Nalien**

Inovasi Pelayanan Publik UPPKB Provinsi Jawa Timur  
melalui Layanan Jembatan Timbang Ditinjau dari Perspektif Reformasi Birokrasi

**Rizki Wulandari**

Efektivitas Pelaksanaan Moratorium dalam Penetapan Kebutuhan PNS  
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah  
Provinsi Bangka Belitung

**Romy Danan Hermawan**

Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah  
dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II (K2) Menjadi CPNS Tahun 2014  
di Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta

**Ahmad Robbi Saputra**

Efektivitas Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan *Computer Assisted Test* Tahun 2014  
di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

**Sucy Tri Ramadhani**

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia  
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Jurnal MSDM	Vol. 3	No. 2	Hlm. 95 — 192	Jakarta, Desember 2016	ISSN 2407-6244
-------------	--------	-------	---------------	------------------------	----------------



PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  
FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

# INOVASI PELAYANAN PUBLIK UPPKB PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI LAYANAN JEMBATAN TIMBANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF REFORMASI BIROKRASI

Elvira Mulya Nalien

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560  
E-mail: elviranalien@gmail.com

## ABSTRACT

*Bureaucratic reform implementation in 2010-2014 assessed not maximized due to the still poor public services are the main causes of bribery (extortion). Poor supervision from related parties resulted in increasingly widespread extortion that corruption is growing as the pathology of bureaucracy. Seeing this phenomenon also occurs in the activities of the freight transport cargo weighing Motor Vehicle Implementation Unit (UPPKB) East Java to launch an innovative program that Service Weigh Corruption-Free Region. Thus, this paper intends to determine the extent UPPKB East Java is able to run the innovative program in minimizing the levies on the activities of freight cargo weigh in order to realize the reform of the bureaucracy.*

*This paper uses descriptive method with inductive approach. The results can be explained that the East Java UPPKB very consistent running program Weigh Service so that it can drastically reduce the levies, creating a Corruption-Free Zone and the most important meeting eight areas of change bureaucratic reform. Achievement is evidenced by the inclusion of this innovative program in the Top 99 Public Service Innovation Year 2016. Nonetheless, the authors still recommend UPPKB East Java continue to update technology-ter information up to date, monitoring the operator or admin and improve the quality of websites that include call center and complaint services either via mail, SMS, e-mail or direct presence.*

*Keywords: public service innovation, service and reforms weigh bridge*

## ABSTRAK

Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2010-2014 dinilai belum maksimal akibat masih buruknya pelayanan publik dengan penyebab utamanya yaitu pungutan liar (pungli). Pengawasan yang lemah dari pihak terkait mengakibatkan pungli kian marak sehingga praktik korupsi semakin berkembang sebagai patologi birokrasi. Melihat fenomena tersebut juga terjadi pada kegiatan muatan angkutan barang maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jawa Timur me-launching program inovatif yaitu Layanan Jembatan Timbang Wilayah Bebas Korupsi. Dengan demikian, tulisan ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana UPPKB Jawa Timur mampu menjalankan program inovatif tersebut dalam meminimalisir praktik pungli pada kegiatan timbang muatan angkutan barang dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.